



ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI, TRANSISI, DAN PASCA-PANDEMI COVID-19 (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021–2023)

Poa Yosia Purnomo, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local tax revenue and revenue from separated regional asset management on Local Own-Source Revenue (PAD) during the COVID-19 pandemic, transition, and post-pandemic periods. The research covers 35 regencies and municipalities in Central Java for 2021–2023 using a quantitative approach with secondary data from BPK Audit Reports and BPS publications. The analysis applies panel data regression, preceded by descriptive statistics and model selection through the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results show that local tax revenue has a positive and significant effect on PAD, while revenue from separated regional asset management has no significant impact. These findings indicate that although the performance of Region-Owned Enterprises (BUMD) improved in the post-pandemic period, their contribution to PAD remains limited compared to local taxes. The study also reveals differences in PAD dynamics across the pandemic, transition, and post-pandemic periods, reflecting variations in regional fiscal adaptability.

Keywords: local tax revenue, separated regional asset management, local own-source revenue, panel data regression, COVID-19 pandemic, Central Java

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya reformasi dan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kebijakan tersebut, daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, serta mengelola hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan lainnya. Kewenangan tersebut menjadikan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai aspek penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah Christia & Ispriyarso, (2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD memiliki peranan strategis karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana

¹ Corresponding author

transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah, Arifiyanti & Ardiyanto, (2022); UU No. 23 Tahun (2014).

Dalam praktiknya, kontribusi masing-masing komponen PAD tidak selalu stabil dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD karena berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang umumnya berasal dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun demikian, kinerja dan kontribusi sumber pendapatan tersebut sering kali menunjukkan perbedaan antar daerah tergantung pada kondisi ekonomi, potensi daerah, serta efektivitas pengelolaan aset daerah.

Perubahan kondisi ekonomi selama periode pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi juga memengaruhi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD. Aktivitas ekonomi yang sempat mengalami penurunan selama pandemi berdampak pada penerimaan pajak daerah serta kinerja pengelolaan aset daerah. Meskipun pada periode selanjutnya terjadi pemulihan ekonomi, kontribusi setiap komponen PAD tidak selalu mengalami peningkatan yang seimbang sehingga menimbulkan dinamika dalam struktur penerimaan daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil mengenai pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Hani & Siska, (2021) di Kabupaten Majalengka menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan, sementara retribusi daerah justru berpengaruh negatif namun signifikan. Penelitian Arifiyanti & Ardiyanto, (2022) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 beberapa jenis pajak daerah mengalami penurunan, sementara jenis pajak lainnya justru meningkat sehingga mencerminkan fluktuasi penerimaan pajak antarjenis pajak. Sementara itu, penelitian (Triarda & Damayanti, 2021) menemukan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD relatif kecil dibandingkan pajak daerah yang mendominasi struktur PAD. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing komponen PAD dapat berbeda tergantung kondisi ekonomi daerah, struktur penerimaan, dan periode penelitian. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* mengenai bagaimana pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memengaruhi PAD pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi COVID-19, khususnya pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran kedua sumber pendapatan tersebut dalam meningkatkan PAD serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keuangan Publik

Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave & Buchanan (1960), pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu alokasi (penyediaan barang dan layanan publik), distribusi (mengurangi ketimpangan pendapatan),

dan stabilisasi (menjaga stabilitas ekonomi). Dalam konteks desentralisasi fiskal, teori ini menekankan pentingnya otonomi keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan pengelolaan aset. Selain itu, teori keuangan publik juga menekankan prinsip efisiensi, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui pajak daerah, retribusi, pendapatan BUMD, dan sumber pendapatan sah lainnya menjadi instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD berasal dari beberapa komponen, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Menurut Arifiyanti & Ardiyanto, (2022), PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah karena merupakan sumber pendapatan yang bersifat rutin dan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Menurut Mahfudz et al., (2022), pajak daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal guna membiayai pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Hal ini juga sejalan dengan teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave & Buchanan, (1960) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah.

H1: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi.

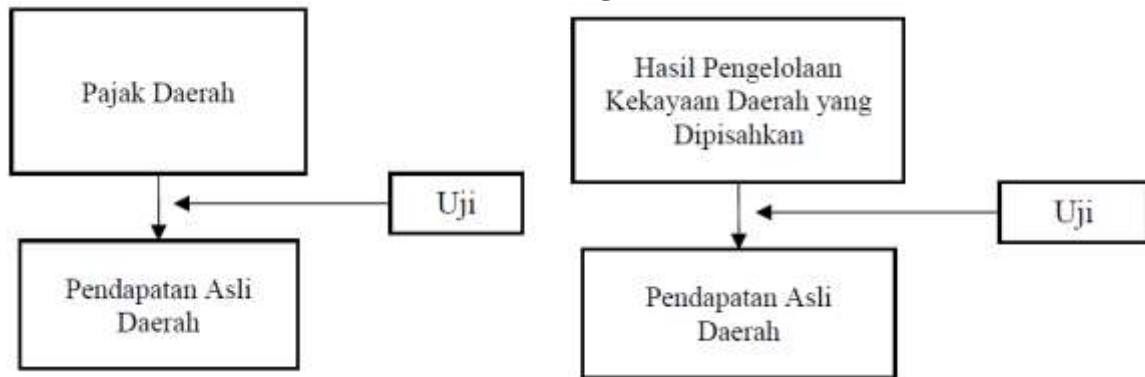
Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain pajak daerah, salah satu komponen PAD yang penting adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan aset daerah, seperti laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau hasil penyertaan modal pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba atau dividen yang diperoleh dari BUMD atau penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak lain.

Dalam perspektif teori keuangan publik, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pendapatan dari pajak, tetapi juga dari pengelolaan aset daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah. Pengelolaan BUMD yang baik dapat meningkatkan laba yang kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Menurut Mahfudz et al., (2022), pendapatan dari aktivitas bisnis BUMD merupakan salah satu sumber penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola secara efektif dan efisien. Dengan demikian, semakin optimal pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap PAD pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Desain Sampel dan Data yang Dikumpulkan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh (saturated sampling)*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan metode ini, semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dijadikan sebagai objek penelitian tanpa melakukan pengurangan atau pemilihan berdasarkan kriteria tertentu.

Jumlah kabupaten dan kota yang menjadi objek penelitian adalah 35 daerah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan selama 3 tahun, yaitu tahun 2021–2023, sehingga total sampel data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 105 data penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data tersebut berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dipublikasikan melalui sumber resmi pemerintah.

Tabel 1. Deskripsi Objek Penelitian

No.	Objek Penelitian	Jumlah
1.	Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	29
2.	Kota di Provinsi Jawa Tengah	6
	Jumlah Sampel Daerah	35
	Tahun Pengamatan	3 Tahun (2021–2023)
	Jumlah Sampel Data (35 × 3)	105

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 10.

Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023. Analisis regresi data panel dipilih karena mampu menggabungkan data *cross section* dan *time series* sehingga dapat memberikan gambaran hubungan antar variabel secara lebih komprehensif serta meningkatkan efisiensi estimasi model penelitian Gujarati & Porter, (2009); Mahfudz et al., (2022).

Tahapan analisis data diawali dengan statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami pola distribusi data dan kondisi awal variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Pemilihan model ini dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)* yang lebih tepat digunakan. Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*, sedangkan uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect Model (REM)* lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model (CEM)*. Melalui serangkaian pengujian tersebut dapat diperoleh model regresi data panel yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen, yang dapat dilihat melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual pada setiap pengamatan. Selanjutnya, uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan antar residual dalam model regresi, sedangkan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal, Gujarati & Porter, (2009).

Setelah model memenuhi asumsi klasik, tahap selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk melihat apakah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Model regresi linier berganda juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan perubahan yang terjadi pada variabel independen, Gujarati & Porter, (2009).

Tahap terakhir adalah pengujian hipotesis, yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan melalui uji *t* (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD, serta uji *F* (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian, Gujarati & Porter, (2009); (Mahfudz et al., 2022).

Tabel 2. Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah = Hasil Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pajak Daerah	Pajak Daerah = Pajak Hotel dan Restoran + Pajak Hiburan + Pajak Reklame + Pajak Penerangan Jalan + Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) + Pajak Parkir + Pajak Air Tanah + Pajak Sarang Burung Walet + Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); serta + Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = Dividen + Laba Usaha + Bagian laba BUMD

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel yang dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12. Uji statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, serta jumlah observasi pada setiap variabel. Adapun hasil pengujian statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	PENDAPA...	PAJAK_DA...	HASIL_PE...
Mean	26.7887704...	25.6560056...	23.6981307...
Median	26.7360888...	25.5895986...	23.6741754...
Maximum	28.6731160...	28.3884654...	25.0894553...
Minimum	26.2078962...	24.3631834...	22.4820740...
Std. Dev.	0.41373259...	0.67466303...	0.53682163...
Skewness	2.32625112...	1.45363289...	0.60492777...
Kurtosis	10.8852586...	7.16853517...	3.58142572...
Jarque-Bera	366.725982...	113.001349...	7.88290273...
Probability	2.32522315...	2.89780267...	0.01942000...
Sum	2812.82089...	2693.88059...	2488.30372...
Sum Sq. Dev.	17.8021646...	47.3377026...	29.9704571...
Observations	105	105	105

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Keterangan:

- X1 = Pajak Daerah
- X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- Y = Pendapatan Asli Daerah

Regresi Data Panel

Model dalam analisis regresi data panel terdiri dari tiga jenis, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Setiap pendekatan memiliki kelebihan serta keterbatasan masing-masing, sehingga diperlukan proses estimasi terhadap setiap model guna menentukan pendekatan yang paling sesuai digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Common Effect Model

Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/02/26 Time: 09:45
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.190011	1.500010	14.61147	0.0000
PAJAK DAERAH	1.220580	0.032662	37.37016	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	1.321609	0.631551	2.092638	0.0389
R-squared	0.952091	Mean dependent var	4.870011	
Adjusted R-squared	0.951151	S.D. dependent var	3.850011	
S.E. of regression	8.510010	Akaike info criterion	53.19945	
Sum squared resid	7.380023	Schwarz criterion	53.27528	
Log likelihood	-2789.971	Hannan-Quinn criter.	53.23017	
F-statistic	1013.515	Durbin-Watson stat	0.924205	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Common Effect Model, Pendekatan ini merupakan bentuk model yang paling sederhana karena tidak memperhatikan perbedaan karakteristik waktu maupun individu, sehingga diasumsikan tidak terdapat perbedaan perilaku data pada setiap periode pengamatan. Metode yang digunakan dalam mengestimasi model ini adalah *Ordinary Least Square (OLS)*, yaitu dengan menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data penampang silang (*cross-section*).

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel yang menunjukkan hasil yang baik, yaitu Pajak Daerah (X1) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X2) sebesar 0,0389. Kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05.

Tabel 5. Fixed Effects Model

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/26 Time: 09:59
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.720011	4.730010	7.877549	0.0000
PAJAK DAERAH	0.550295	0.081446	6.756542	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	0.330609	2.240962	0.147530	0.8832
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.992717	Mean dependent var	4.870011	
Adjusted R-squared	0.988862	S.D. dependent var	3.850011	
S.E. of regression	4.060010	Akaike info criterion	51.96325	
Sum squared resid	1.120023	Schwarz criterion	52.89845	
Log likelihood	-2691.071	Hannan-Quinn criter.	52.34221	
F-statistic	257.4810	Durbin-Watson stat	3.332136	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Fixed Effects Model, Pendekatan ini diterapkan apabila terdapat perbedaan kontribusi antarindividu. Perbedaan tersebut diakomodasi melalui variasi pada nilai intersep. Penggunaan teknik variabel *dummy* digunakan untuk mengidentifikasi serta mengestimasi variasi intersep antarindividu.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa terdapat satu variabel yang menunjukkan kinerja baik dan satu variabel yang menunjukkan kinerja kurang baik. Nilai probabilitas Pajak Daerah (X1) sebesar 0,0000, berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena mempunyai angka $< 0,05$ dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X2) sebesar 0,8832, tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena mempunyai angka $> 0,05$.

Tabel 6. Random Effects Model

Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/02/26 Time: 09:52
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.350011	2.070010	11.39852	0.0000
PAJAK DAERAH	1.063443	0.041249	25.78098	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	1.925901	0.843158	2.284153	0.0244

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		6.660010	0.7290
Idiosyncratic random		4.060010	0.2710

Weighted Statistics			
R-squared	0.850899	Mean dependent var	1.620011
Adjusted R-squared	0.847975	S.D. dependent var	1.340011
S.E. of regression	5.240010	Sum squared resid	2.800023
F-statistic	291.0494	Durbin-Watson stat	2.042774
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.939700	Mean dependent var	4.870011
Sum squared resid	9.290023	Durbin-Watson stat	0.616644

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Pendekatan ini mengasumsikan adanya perbedaan antarindividu dan antarwaktu yang direpresentasikan melalui intersep. Variasi tersebut diakomodasi melalui komponen galat dengan asumsi bahwa galat memiliki keterkaitan baik pada dimensi *cross-section* maupun *time series*.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa terdapat dua variabel yang menunjukkan hasil yang baik. Nilai probabilitas Pajak Daerah (X1) sebesar 0,0000 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X2) sebesar 0,0244. Kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji Model

Tabel 7. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.157146	(34,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	197.800871	34	0.0000

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model melalui Uji Chow (*Redundant Fixed Effects Test*), diperoleh nilai probabilitas pada *Cross-section F* sebesar 0,0000 dan *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Kedua variabel tersebut $< 0,05$, artinya (H_0) ditolak, sehingga model *Common Effect* dinilai kurang tepat dibandingkan dengan model *Fixed Effect*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antarunit *cross-section* (individu/daerah), yang perlu diakomodasi melalui perbedaan intersep pada masing-masing unit pengamatan.

Tabel 8. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

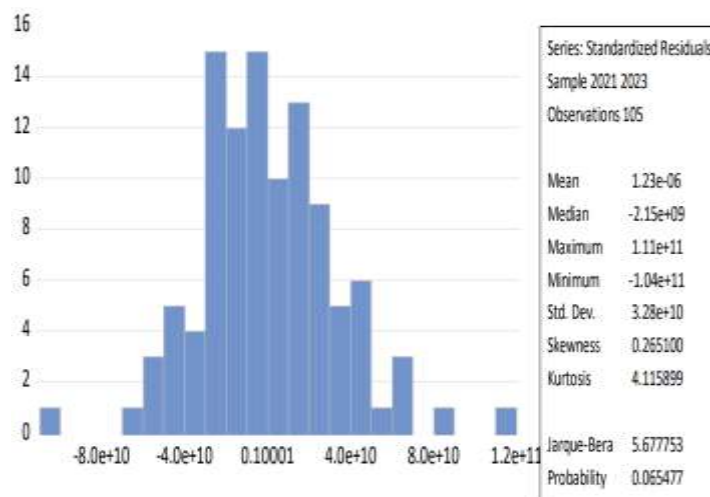
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	69.962897	2	0.0000

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model melalui Uji Hausman (*Correlated Random Effects – Hausman Test*), diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya (H_0) ditolak, sehingga model *Random Effect* dinilai kurang tepat dibandingkan dengan model *Fixed Effect*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan antara efek individual (*cross-section*) dengan variabel independen, sehingga pendekatan *Fixed Effect* lebih mampu merepresentasikan karakteristik khusus pada masing-masing unit pengamatan secara lebih akurat.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 9. Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai Jarque–Bera sebesar 5,677753 dengan nilai probabilitas sebesar $0,065477 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 10. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 01/06/26 Time: 09:53
Sample: 1 105
Included observations: 105

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.833792	2534.739	NA
PAJAK_DAERAH	0.000839	1680.241	1.150043
HASIL_PENGELOLA...	0.001325	2263.908	1.150043

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Guna mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* Nauw & Riharjo, (2021). Kriteria pengujian menyatakan bahwa multikolinearitas terjadi apabila nilai $VIF > 10$, sedangkan apabila nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF pada variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 1,150043 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X2) sebesar $1,150043 < 10$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 11. Uji Autokorelasi

Mean dependent var	1.620011
S.D. dependent var	1.340011
Sum squared resid	2.800023
Durbin-Watson stat	2.042774

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin–Watson (DW) menunjukkan nilai DW sebesar 2,042. Sementara itu, nilai batas atas yang diperoleh dari perhitungan 4 dikurangi dU ($4 - dU$) adalah sebesar 2,279. Dengan demikian, nilai DW berada di antara batas atas dan 4 dikurangi batas atas ($dU < DW < 4 - dU$), yaitu $1,721 < 2,042 < 2,279$. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
Method: Panel Least Squares
Date: 01/06/26 Time: 09:59
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.72 0011	4.730010	7.877549	0.0000
PAJAK_DAERAH	0.550295	0.081446	6.756542	0.0000
HASIL_PENGELOLAAN_KEKAYAAN_D...	0.330609	2.240962	0.147530	0.8832

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Agar mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka berdasarkan tabel Analisis Regresi Linear Berganda disimpulkan bahwa adanya persamaan regresi $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$ yaitu Kinerja Keuangan Daerah = $3.720011 + 0.550295 + 0.330609 + \epsilon$

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.992717
Adjusted R-squared	0.988862
S.E. of regression	4.060010
Sum squared resid	1.120023
Log likelihood	-2691.071
F-statistic	257.4810
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan uji koefisien determinasi (R²) Nauw & Riharjo, (2021). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²), diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,988862 atau setara dengan 98,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, sebesar 1,1% variasi Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 14. Uji T (Uji Parsial)

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
Method: Panel Least Squares
Date: 01/06/26 Time: 09:59
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.720011	4.730010	7.877549	0.0000
PAJAK_DAERAH	0.550295	0.081446	6.756542	0.0000
HASIL_PENGLOLAAN_KEKAYAAN_D...	0.330609	2.240962	0.147530	0.8832

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Guna mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, digunakan uji t (uji parsial), Nauw & Riharjo, (2021). Kriteria pengujian uji t menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial apabila nilai probabilitas < 0,05, sedangkan apabila nilai probabilitas > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Tabel 15, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Berdasarkan Tabel 15, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,8832 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Beda Pengaruh (Tingkat Perbedaan Pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y)

Masa Pandemi 2021

Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Method: Least Squares
Date: 01/02/26 Time: 10:06
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.240011	2.540010	8.818716	0.0000
PAJAK DAERAH	1.438240	0.074044	19.42399	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	1.253956	1.174811	1.067368	0.2938

R-squared	0.946494	Mean dependent var	4.830011
Adjusted R-squared	0.943149	S.D. dependent var	3.530011
S.E. of regression	8.420010	Akaike info criterion	53.23223
Sum squared resid	2.270023	Schwarz criterion	53.36555
Log likelihood	-928.5640	Hannan-Quinn criter.	53.27825
F-statistic	283.0294	Durbin-Watson stat	2.024222
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan hasil uji beda pengaruh pada periode pandemi tahun 2021 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Sebaliknya, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2938 ($> 0,05$), sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan tetapi positif terhadap PAD. Dengan demikian, pada masa pandemi tahun 2021 Pajak Daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi PAD.

Masa Transisi (2022)

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
Method: Least Squares
Date: 01/02/26 Time: 12:31
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.180011	2.190010	9.941875	0.0000
PAJAK DAERAH	1.169088	0.044990	25.98530	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	0.864408	0.908487	0.951480	0.3485

R-squared	0.966605	Mean dependent var	4.730011
Adjusted R-squared	0.964517	S.D. dependent var	3.820011
S.E. of regression	7.190010	Akaike info criterion	52.91620
Sum squared resid	1.650023	Schwarz criterion	53.04952
Log likelihood	-923.0336	Hannan-Quinn criter.	52.96222
F-statistic	463.1072	Durbin-Watson stat	2.445521
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan hasil uji beda Pengaruh pada periode transisi tahun 2022, variabel Pajak Daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Sementara itu, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3485 ($> 0,05$), sehingga tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap PAD tetapi positif. Dengan demikian, pada masa transisi tahun 2022 Pajak Daerah menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi PAD.

Masa Pasca Pandemi (2023)

Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Method: Least Squares
Date: 01/02/26 Time: 12:37
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.040011	2.220010	9.170511	0.0000
PAJAK DAERAH	1.186327	0.042012	28.23797	0.0000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D...	1.534498	0.883597	1.736648	0.0921

R-squared	0.973572	Mean dependent var	5.050011
Adjusted R-squared	0.971920	S.D. dependent var	4.270011
S.E. of regression	7.160010	Akaike info criterion	52.90702
Sum squared resid	1.640023	Schwarz criterion	53.04034
Log likelihood	-922.8729	Hannan-Quinn criter.	52.95304
F-statistic	589.4194	Durbin-Watson stat	2.258708
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 01, 2026

Berdasarkan hasil uji beda pengaruh pada periode pasca pandemi tahun 2023, variabel Pajak Daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Sementara itu, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0921 ($> 0,05$), sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan tetapi positif terhadap PAD. Dengan demikian, pada periode pasca pandemi tahun 2023 Pajak Daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi PAD.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi sumber utama dan paling stabil dalam meningkatkan PAD meskipun terjadi guncangan ekonomi, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kontribusinya relatif kecil dan dipengaruhi oleh kinerja BUMD serta pengelolaan aset daerah yang belum optimal, sedangkan Pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi, pajak daerah konsisten berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PAD masih didominasi oleh pajak daerah.

KESIMPULAN

Selama periode 2021–2023 pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami dinamika pada masa pandemi, transisi, dan pasca-pandemi. Pajak daerah tetap menjadi komponen yang paling dominan dan terbukti berpengaruh positif serta signifikan terhadap PAD di seluruh periode, sehingga menjadi sumber penerimaan yang paling konsisten dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki koefisien positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, karena kontribusinya relatif kecil. Pada

masa pandemi kontribusinya cenderung lemah akibat tekanan ekonomi, sementara pada masa transisi dan pasca-pandemi mulai menunjukkan perbaikan tetapi masih belum menjadi sumber utama peningkatan PAD.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengayaan data dengan menambahkan data primer serta memperluas sumber dan periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan metode analisis yang lebih variatif, misalnya dengan menggunakan pendekatan *mixed methods*, sehingga tidak hanya mampu menjelaskan hubungan statistik antar variabel, tetapi juga dapat menggali aspek non-kuantitatif secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Analysis of Local Tax Revenue on Local Revenue Before and After the Covid-19 Pandemic in Regencies and Cities in Central Java. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- BPK. (2022). *PPID Badan Pemeriksa Keuangan RI*. 26–29. <https://www.foodstation.id/>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Durbin Watson. (2018). *Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10 54 STEI*. 54–73.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Hani, S. M., & Siska, A. R. (2021). Pengaruh pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Majalengka 2017-2019. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 2.
- Mahfudz, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Pusaka Almada.
- Musgrave, A., & Buchanan, J. M. (1960). Review : The Theory of Public Finance Reviewed Work (s): The Theory of Public Finance : A Study in Public Economy by Richard Published by : Southern Economic Association Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/1054956>. *Southern Economic Journal*, 26(3), 234–238.
- Nauw, & Riharjo, (2021). (2021). *Tabel 4. 1 Sampel Penelitian*. 35–50.
- RI, P. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Pp, Nomor 33 Tahun 2004*, 30(8), 2221.
- RI, P. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Pp, Nomor 23 Tahun 2014*.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>